



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1226, 2020

KEMEN-PPN/BAPPENAS.
Perubahan.

Kelas

Jabatan.

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KELAS
JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan perubahan struktur organisasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- b. bahwa kelas jabatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sudah tidak sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan nasional tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
 6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 273);
 7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1824);

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1520);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1824), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 740), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Lampiran Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1824), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 740) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pegawai yang dilantik berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1520), diberikan tunjangan kinerja sesuai dengan kelas jabatan yang tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak saat pelantikan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja yang tertinggi bagi jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Ajudan Menteri, Patroli dan Pengawasan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil di luar lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Prajurit Tentara Nasional Indonesia hanya berhak menerima salah satu tunjangan kinerja yang dipilihnya.
- (2) Dalam hal Ajudan Menteri, Patroli dan Pengawasan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih untuk mendapatkan tunjangan kinerja dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, maka penetapan kelas jabatan disesuaikan dengan kepangkatan dan kelas jabatan pada instansi asalnya atau pada kesatuannya.
- (3) Tunjangan kinerja Ajudan Menteri, Patroli dan Pengawasan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhitung sejak penetapan Surat Perintah Melaksanakan Tugas dalam jabatan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2020

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 NASIONAL
 NOMOR 9 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN MENTERI PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG
 KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 NASIONAL

A. DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL DAN KELAS JABATAN DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
1	Menteri PPN/Kepala Bappenas	Tanpa Kelas
2	Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas	17
3	Deputi Bidang Ekonomi	17
4	Deputi Bidang Pengembangan Regional	17
5	Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	17
6	Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan	17
7	Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan	17
8	Deputi Bidang Sarana dan Prasarana	17
9	Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	17

10	Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan	17
11	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	17
12	Inspektorat Utama	17
13	Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan	16
14	Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	16
15	Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur	16
16	Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan	16
17	Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan	16
18	Staf Khusus Menteri	16
19	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan	15
20	Kepala Biro Sumber Daya Manusia	15
21	Kepala Biro Hukum	15
22	Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana	15
23	Kepala Biro Umum	15
24	Direktur Perencanaan Makro Dan Analisis Statistik	15
25	Direktur Keuangan Negara Dan Analisis Moneter	15
26	Direktur Jasa Keuangan dan Badan Usaha Milik Negara	15
27	Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional	15
28	Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	15
29	Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana	15
30	Direktur Pembangunan Daerah	15
31	Direktur Regional I	15
32	Direktur Regional II	15
33	Direktur Regional III	15
34	Direktur Pangan dan Pertanian	15
35	Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	15
36	Direktur Kelautan dan Perikanan	15
37	Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan	15
38	Direktur Lingkungan Hidup	15

39	Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial	15
40	Direktur Ketenagakerjaan	15
41	Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	15
42	Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi	15
43	Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat	15
44	Direktur Pendidikan Tinggi dan Iptek	15
45	Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan	15
46	Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga	15
47	Direktur Pengairan dan Irigasi	15
48	Direktur Transportasi	15
49	Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika	15
50	Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional	15
51	Direktur Perumahan dan Permukiman	15
52	Direktur Politik dan Komunikasi	15
53	Direktur Aparatur Negara	15
54	Direktur Hukum dan Regulasi	15
55	Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional	15
56	Direktur Pertahanan dan Keamanan	15
57	Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan	15
58	Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan	15
59	Direktur Kerjasama Pendanaan Bilateral	15
60	Direktur Kerjasama Pendanaan Multilateral	15
61	Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan	15
62	Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	15
63	Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral	15
64	Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah	15
65	Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan	15
66	Inspektur Bidang Administrasi Umum	15

67	Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan	15
68	Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana	15
69	Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	15
70	Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja	15
71	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik	13
72	Kepala Bagian Persidangan dan Protokol	13
73	Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan	13
74	Kepala Bagian Perpustakaan dan Kearsipan	13
75	Kepala Bagian Pengelolaan Sumber Daya Manusia	13
76	Kepala Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia	13
77	Kepala Bagian Kinerja Pegawai	13
78	Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	13
79	Kepala Bagian Bantuan Hukum	13
80	Kepala Bagian Pengembangan dan Informasi Hukum	13
81	Kepala Bagian Program dan Anggaran	13
82	Kepala Bagian Pengembangan Kerja Sama	13
83	Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi	13
84	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	13
85	Kepala Bagian Barang Milik Negara dan Persuratan	13
86	Kepala Bagian Pengadaan dan Layanan Internal	13
87	Kepala Bagian Keuangan	13
88	Kepala Bagian Verifikasi Anggaran	13
89	Kepala Subdirektorat Perencanaan Ekonomi Makro	13
90	Kepala Subdirektorat Neraca Pembayaran	13
91	Kepala Subdirektorat Analisis Ekonomi dan Statistik	13
92	Kepala Subdirektorat Penerimaan Negara	13
93	Kepala Subdirektorat Belanja Pemerintah Pusat	13
94	Kepala Subdirektorat Perimbangan Keuangan	13
95	Kepala Subdirektorat Pembiayaan dan Analisis Moneter	13
96	Kepala Subdirektorat Jasa Keuangan Konvensional	13
97	Kepala Subdirektorat Jasa Keuangan Syariah	13

98	Kepala Subdirektorat Badan Usaha Milik Negara	13
99	Kepala Subdirektorat Perdagangan	13
100	Kepala Subdirektorat Investasi	13
101	Kepala Subdirektorat Kerjasama Ekonomi Internasional	13
102	Kepala Subdirektorat Industri	13
103	Kepala Subdirektorat Pariwisata	13
104	Kepala Subdirektorat Ekonomi Kreatif	13
105	Kepala Subdirektorat Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional	13
106	Kepala Subdirektorat Penanganan Bencana	13
107	Kepala Subdirektorat Pertanahan	13
108	Kepala Subdirektorat Sistem Informasi dan Data Regional	13
114	Kepala Subdirektorat Perkotaan	13
113	Kepala Subdirektorat Perdesaan	13
109	Kepala Subdirektorat Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah	13
110	Kepala Subdirektorat Keuangan Daerah	13
111	Kepala Subdirektorat Sumatera I	13
112	Kepala Subdirektorat Sumatera II	13
115	Kepala Subdirektorat Jawa I	13
116	Kepala Subdirektorat Jawa II dan Bali	13
117	Kepala Subdirektorat Kalimantan I	13
118	Kepala Subdirektorat Kalimantan II	13
119	Kepala Subdirektorat Sulawesi I	13
120	Kepala Subdirektorat Sulawesi II dan Nusa Tenggara Barat	13
121	Kepala Subdirektorat Nusa Tenggara Timur	13
122	Kepala Subdirektorat Maluku dan Maluku Utara	13
123	Kepala Subdirektorat Papua	13
124	Kepala Subdirektorat Papua Barat	13
125	Kepala Subdirektorat Pangan	13
126	Kepala Subdirektorat Perkebunan dan Hortikultura	13
127	Kepala Subdirektorat Peternakan	13
128	Kepala Subdirektorat Kelembagaan Pertanian	13

129	Kepala Subdirektorat Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	13
130	Kepala Subdirektorat Pengembangan Jasa Lingkungan Kehutanan	13
131	Kepala Subdirektorat Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Air	13
132	Kepala Subdirektorat Tata Kelola Laut dan Pesisir	13
133	Kepala Subdirektorat Perikanan	13
134	Kepala Subdirektorat Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman	13
135	Kepala Subdirektorat Minyak dan Gas Bumi	13
136	Kepala Subdirektorat Mineral, Pertambangan dan Panas Bumi	13
137	Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Konservasi Energi	13
138	Kepala Subdirektorat Kualitas Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Sistem Siaga Bencana	13
139	Kepala Subdirektorat Konservasi SDA dan Keanekaragaman Hayati	13
140	Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	13
141	Kepala Subdirektorat Analisis Kependudukan	13
142	Kepala Subdirektorat Jaminan Sosial	13
143	Kepala Subdirektorat Tata Kelola Kependudukan	13
144	Kepala Subdirektorat Kesempatan Kerja	13
145	Kepala Subdirektorat Kualitas Tenaga Kerja	13
146	Kepala Subdirektorat Hubungan Ketenagakerjaan	13
147	Kepala Subdirektorat Analisis Hukum Ketenagakerjaan	13
148	Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat	13
149	Kepala Subdirektorat Pengurangan Kemiskinan	13
150	Kepala Subdirektorat Bantuan Sosial	13
151	Kepala Subdirektorat Data dan Analisis Kemiskinan	13
152	Kepala Subdirektorat Pengembangan Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha	13
153	Kepala Subdirektorat Produktivitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	13
154	Kepala Subdirektorat Pengembangan Koperasi	13
155	Kepala Subdirektorat Kesehatan Masyarakat	13

156	Kepala Subdirektorat Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian	13
157	Kepala Subdirektorat Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan Kesehatan	13
158	Kepala Subdirektorat Pemberdayaan dan Gizi Masyarakat	13
159	Kepala Subdirektorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	13
160	Kepala Subdirektorat Pendidikan Dasar dan Menengah	13
161	Kepala Subdirektorat Guru dan Tenaga Kependidikan	13
162	Kepala Subdirektorat Agama dan Kebudayaan	13
163	Kepala Subdirektorat Pembelajaran dan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	13
164	Kepala Subdirektorat Sumber Daya Pendidikan Tinggi	13
165	Kepala Subdirektorat Difusi dan Inovasi Teknologi	13
166	Kepala Subdirektorat Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	13
167	Kepala Subdirektorat Keluarga Berencana	13
168	Kepala Subdirektorat Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak	13
169	Kepala Subdirektorat Pemuda	13
170	Kepala Subdirektorat Olahraga	13
171	Kepala Subdirektorat Pendayagunaan Sumberdaya Air	13
172	Kepala Subdirektorat Kelembagaan dan Konservasi Sumber Air	13
173	Kepala Subdirektorat Sungai Pantai dan Pengendalian Daya Rusak Air	13
174	Kepala Subdirektorat Darat dan Perkeretaapian	13
175	Kepala Subdirektorat Jalan	13
176	Kepala Subdirektorat Laut	13
177	Kepala Subdirektorat Udara	13
178	Kepala Subdirektorat Ketenagalistrikan	13
179	Kepala Subdirektorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	13
180	Kepala Subdirektorat Ekosistem dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	13
181	Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur Prioritas Kewilayahan	13

182	Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Pengembangan Proyek Strategis Nasional	13
183	Kepala Subdirektorat Perumahan	13
184	Kepala Subdirektorat Air Minum	13
185	Kepala Subdirektorat Sanitasi	13
186	Kepala Subdirektorat Kelembagaan Demokrasi	13
187	Kepala Subdirektorat Wawasan Kebangsaan	13
188	Kepala Subdirektorat Komunikasi	13
189	Kepala Subdirektorat Kelembagaan dan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	13
190	Kepala Subdirektorat Kualitas Pelayanan Publik	13
191	Kepala Subdirektorat Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan	13
192	Kepala Subdirektorat Sinergitas Kebijakan dan Regulasi	13
193	Kepala Subdirektorat Pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia	13
194	Kepala Subdirektorat Penerapan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	13
195	Kepala Subdirektorat Politik Luar Negeri	13
196	Kepala Subdirektorat Kerjasama Pembangunan Global	13
197	Kepala Subdirektorat Kerjasama Pembangunan Regional	13
198	Kepala Subdirektorat Ketahanan Negara	13
199	Kepala Subdirektorat Pertahanan Negara	13
200	Kepala Subdirektorat Keamanan dan Ketertiban	13
201	Kepala Subdirektorat Perencanaan Pendanaan Dalam Negeri	13
202	Kepala Subdirektorat Perencanaan Pendanaan Luar Negeri	13
203	Kepala Subdirektorat Strategi dan Prosedur Pemanfaatan Pendanaan Pembangunan	13
204	Kepala Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pendanaan Pembangunan	13
205	Kepala Subdirektorat Sistem Perencanaan dan Pengalokasian Anggaran Pendanaan Pembangunan	13
206	Kepala Subdirektorat Alokasi Pendanaan Bidang Ekonomi, Maritim dan Sumber Daya Alam	13
207	Kepala Subdirektorat Alokasi Pendanaan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	13

208	Kepala Subdirektorat Alokasi Pendanaan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	13
209	Kepala Subdirektorat Pendanaan Bilateral Asia	13
210	Kepala Subdirektorat Pendanaan Bilateral Eropa	13
211	Kepala Subdirektorat Pendanaan Bilateral Amerika, Pasifik dan Timur Tengah	13
212	Kepala Subdirektorat Pendanaan Multilateral Persatuan Bangsa Bangsa dan Kerja Sama Pembangunan Global	13
213	Kepala Subdirektorat Pendanaan Multilateral Bank Dunia dan Bank Regional Eropa	13
214	Kepala Subdirektorat Pendanaan Multilateral <i>Asian Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank</i> , dan Bank Regional Asia	13
215	Kepala Subdirektorat Pendanaan Multilateral <i>Islamic Development Bank, Saudi Fund for Development</i> , dan Bank Regional Timur Tengah	13
216	Kepala Subdirektorat Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Infrastruktur dan Sosial	13
217	Kepala Subdirektorat Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah	13
218	Kepala Subdirektorat Regulasi dan Kelembagaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Pembiayaan Investasi dan Non-Anggaran Pemerintah	13
219	Kepala Subdirektorat Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	13
220	Kepala Subdirektorat Sistem Informasi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	13
221	Kepala Subdirektorat Sistem Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	13
222	Kepala Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi	13
223	Kepala Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Budaya	13
224	Kepala Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	13
225	Kepala Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Wilayah I	13
226	Kepala Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Wilayah II	13
227	Kepala Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Wilayah III	13
228	Kepala Subdirektorat Data dan Informasi Penyusunan Rencana Pembangunan	13

229	Kepala Subdirektorat Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan	13
230	Kepala Subdirektorat Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan	13
231	Kepala Bagian Program dan Tata Usaha	13
232	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Informasi Pendidikan dan Pelatihan	13
233	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana	13
234	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan	13
235	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelatihan	13
236	Kepala Bidang Pengelolaan Data Statistik, Informasi Geospasial, dan Basis Data	13
237	Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	13
238	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Pengetahuan	13
239	Kepala Bidang Inovasi Data	13
240	Kepala Bidang Pengelolaan Kebijakan	13
241	Kepala Bidang Analisis Kebijakan	13
242	Kepala Bidang Analisis Kinerja	13
243	Kepala Subbagian Komunikasi dan Publikasi	11
244	Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga dan Pelayanan Informasi Publik	11
245	Kepala Subbagian Persidangan	11
246	Kepala Subbagian Protokol	11
247	Kepala Subbagian Penyajian Bahan	11
248	Kepala Subbagian TU Menteri PPN/Kepala Bappenas	11
249	Kepala Subbagian TU Sekretaris Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas	11
250	Kepala Subbagian TU Deputi Bidang Ekonomi	11
251	Kepala Subbagian TU Deputi Bidang Pengembangan Regional	11
252	Kepala Subbagian TU Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	11
253	Kepala Subbagian TU Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan	11
254	Kepala Subbagian TU Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan	11

255	Kepala Subbagian TU Deputi Bidang Sarana dan Prasarana	11
256	Kepala Subbagian TU Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	11
257	Kepala Subbagian TU Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan	11
258	Kepala Subbagian TU Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	11
259	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia	11
260	Kepala Subbagian Mutasi Sumber Daya Manusia	11
261	Kepala Subbagian Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia	11
262	Kepala Subbagian Sistem Informasi Sumber Daya Manusia	11
263	Kepala Subbagian Sistem Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pegawai	11
264	Kepala Subbagian Penghargaan dan Penegakan Disiplin Pegawai	11
265	Kepala Subbagian Penyusunan Peraturan	11
266	Kepala Subbagian Penyusunan Keputusann	11
267	Kepala Subbagian Pembelaan dan Pendampingan Hukum	11
268	Kepala Subbagian Pelayanan dan Pendapat Hukum	11
269	Kepala Subbagian Pengembangan Hukum	11
270	Kepala Subbagian Data dan Informasi Hukum	11
271	Kepala Subbagian Program	11
272	Kepala Subbagian Anggaran	11
273	Kepala Subbagian Perencanaan Kerja Sama	11
274	Kepala Subbagian Kerja Sama Kelembagaan Perencanaan	11
275	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Anggaran	11
276	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	11
277	Kepala Subbagian Organisasi	11
278	Kepala Subbagian Ketatalaksanaan	11
279	Kepala Subbagian Akuntansi Barang Milik Negara	11
280	Kepala Subbagian Tata Kelola Layanan Barang Milik Negara dan Persuratan	11

281	Kepala Subbagian Perencanaan Pengadaan	11
282	Kepala Subbagian Layanan Internal	11
283	Kepala Subbagian Kas dan Perbendaharaan	11
284	Kepala Subbagian Pelaporan Keuangan	11
285	Kepala Subbagian Pengujian Perintah Pembayaran	11
286	Kepala Subbagian Pelaporan Pembayaran	11
287	Kepala Subbagian Tata Usaha (Inspektorat Utama)	11
288	Kepala Subbagian Program (Inspektorat Utama)	11
289	Kepala Subbagian Tata Usaha (Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana)	11
290	Kepala Subbidang Perencanaan Program Pendidikan dan Pelatihan	11
291	Kepala Subbidang Pengembangan Sarana Prasarana, Informasi dan Layanan Pendidikan dan Pelatihan	11
292	Kepala Subbidang Pengembangan dan Penilaian Jabatan Fungsional Perencana	11
293	Kepala Subbidang Pembinaan dan Layanan Jabatan Fungsional Perencana	11
294	Kepala Subbidang Pengelolaan Pendidikan	11
295	Kepala Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Pendidikan	11
296	Kepala Subbidang Pengelolaan Pelatihan	11
297	Kepala Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan	11
298	Kepala Subbagian Tata Usaha (Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan)	11
299	Kepala Subbidang Pengolahan Data	11
300	Kepala Subbidang Penyajian dan Diseminasi Data	11
301	Kepala Subbidang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	11
302	Kepala Subbidang Pendayagunaan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	11
303	Kepala Subbidang Pengolahan dan Penyebarluasan Informasi Terekam	11
304	Kepala Subbidang Pengolahan dan Penyebarluasan Manajemen Pengetahuan	11
305	Kepala Subbidang Pengembangan Ekosistem Inovasi Data	11
306	Kepala Subbidang Pemanfaatan Inovasi Data	11
307	Kepala Subbagian Tata Usaha (Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja)	11

308	Kepala Subbidang Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Analisis Kebijakan	11
309	Kepala Subbidang Kerjasama dan Harmonisasi Analisis Kebijakan	11

B. DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU, JABATAN PELAKSANA DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Keterangan
1	2	4	
1	Perencana Utama	14	
2	Perencana Madya	12	
3	Perencana Muda	10	
4	Perencana Pertama	9	
5	Auditor Utama	14	
6	Auditor Madya	12	
7	Auditor Muda	10	
8	Auditor Pertama	9	
9	Auditor Penyelia	9	
10	Auditor Pelaksana Lanjutan	7	
11	Auditor Pelaksana	6	
12	Widyaiswara Utama	13	
13	Widyaiswara Madya	11	
14	Widyaiswara Muda	9	
15	Widyaiswara Pertama	8	
16	Arsiparis Utama	13	
17	Arsiparis Madya	11	
18	Arsiparis Muda	9	
19	Arsiparis Pertama	8	

20	Arsiparis Penyelia	8	
21	Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	
22	Arsiparis Pelaksana/Terampil	6	
23	Staf Perencana Tk. I	7	Pernah diangkat dalam jabatan
24	Staf Perencana/ Calon Perencana Pertama	6	Belum pernah diangkat dalam jabatan
25	Calon Auditor Tingkat Ahli	6	
26	Calon Auditor Tingkat Terampil	4	
27	Tata Usaha Tk.I/ Pengadministrasi Umum Tk. I	5	Gol. III/a ke atas
28	Teknisi Tk. I	5	Gol. III/a ke atas
29	Tata Usaha/ Pengadministrasi Umum	4	Gol. II/a – II/d
30	Teknisi	4	Gol. II/a – II/d
31	Satpam	3	
32	Caraka	3	
33	Pengemudi	3	
34	Pramubakti	3	

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUHARSO MONOARFA